

100 Hari: Kebijakan Fiskal dan Program Makan Bergizi Gratis

Riza Annisa Pujarama

29 Januari 2025



ASUMSI DASAR MAKROEKONOMI

Perkembangan Asumsi Dasar Makroekonomi 2024

No	Indikator	Target	Realisasi	
1	Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy)	5,2	5	▼
2	Inflasi (% ,yoy)	2,8	1,57	▲
3	Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD, eop)	15.000	16.162	▼
4	Yield SBN 10 Tahun (% ,eop)	6.7	7	▼
5	ICP (USD/barrel)	82	71,6	▼
6	Lifting Minyak (Ribuh BPH)	635	571.7	▼
7	Lifting Gas (Ribuh BSMPH)	1.033	973	▼

Sumber: Kementerian Keuangan, 2025

Note : ▼ Tidak Memenuhi Target

▲ Memenuhi Target

- Perkembangan asumsi dasar makro akan mempengaruhi performa APBN baik dari penerimaan maupun belanja.
- Nilai tukar rupiah yang terus melemah dan imbal hasil SBN yang terdorong tinggi serta harga minyak bumi yang rendah mempengaruhi kinerja APBN dari segi penerimaan dan tanggung jawab utang di masa depan, yang berpotensi membuat generasi berikutnya harus menanggung beban utang lebih tinggi.

KEBIJAKAN FISKAL

*) Realisasi Sementara

PENDAPATAN NEGARA
Rp2.842,5 T
 ▲ 2,1 % (yoy)

BELANJA NEGARA
Rp3.350,3 T
 ▲ 7,3 % (yoy)

DEFISIT APBN
Rp507,8 T (2,29% PDB)

DEFISIT KESEIMBANGAN PRIMER
Rp19,4 T

SILPA
Rp45,4 T

URAIAN (triliun rupiah)	2023		2024					
	LKPP (Audited)	Growth (%)	APBN	Outlook (Lapsem)	Realisasi (Sementara)	% thd APBN	% thd Outlook Lapsem	Growth (%)
A. PENDAPATAN NEGARA	2.783,9	5,6	2.802,3	2.802,5	2.842,5	101,4	101,4	2,1
I. Penerimaan Perpajakan	2.154,2	5,9	2.309,9	2.218,4	2.232,7	96,7	100,6	3,6
1. Penerimaan Pajak	1.867,9	8,8	1.988,9	1.921,9	1.932,4	97,2	100,5	3,5
2. Kepabeanan & Cukai	286,3	(9,9)	321,0	296,5	300,2	93,5	101,3	4,9
II. PNBP	612,5	2,8	492,0	549,1	579,5	117,8	105,5	(5,4)
III. Hibah	17,2	201,7	0,4	34,9	30,3	7.034,5	86,7	76,3
B. BELANJA NEGARA	3.121,2	0,8	3.325,1	3.412,2	3.350,3	100,8	98,2	7,3
I. Belanja Pemerintah Pusa	2.239,8	(1,8)	2.467,5	2.558,2	2.486,7	100,8	97,2	11,0
1. Belanja K/L	1.152,2	6,2	1.090,8	1.198,8	1.315,0	120,6	109,7	14,1
2. Belanja non-K/L	1.087,6	(9,0)	1.376,7	1.359,4	1.171,7	85,1	86,2	7,7
II. Transfer Ke Daerah	881,4	8,0	857,6	854,0	863,5	100,7	101,1	(2,0)
C. KESEIMBANGAN PRIMER	102,6	(238,5)	(25,5)	(110,8)	(19,4)	75,9	17,5	(118,9)
D. SURPLUS/(DEFISIT)	(337,3)	(26,7)	(522,8)	(609,7)	(507,8)	97,1	83,3	50,6
% thd PDB	(1,61)		(2,29)	(2,70)	(2,29)			
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	356,7	(39,6)	522,8	609,7	553,2	105,8	90,7	55,1
SILPA/(SIKPA)	19,4		-	-	45,4			

Penerimaan perpajakan meleset dari target pada 2024.

Belanja melebihi target.

Sumber: Kementerian Keuangan, 2025

PENERIMAAN PERPAJAKAN



Sumber: Kementerian Keuangan, 2025

- Penerimaan perpajakan mengalami peningkatan dibandingkan dengan 2023, namun demikian tidak memenuhi target APBN.
- Target penerimaan perpajakan APBN 2024 adalah sebesar 2.309,9 triliun rupiah sementara realisasi sementara 2024 sebesar 2.232,7 triliun rupiah, selisihnya yaitu -77.2 triliun rupiah.
- **Realisasi penerimaan perpajakan di triwulan IV-2024 mengalami peningkatan** setelah mengalami penurunan disepanjang triwulan 1 hingga triwulan 3 di 2024.
- Peningkatan performa perpajakan di triwulan IV-2024 ditopang pertumbuhan positif PPh Badan yang pada triwulan 1 hingga triwulan 3 di 2024 mengalami kontraksi.
- Sementara itu dilihat dari sektoral, penerimaan perpajakan meningkat ditopang sektor pertambangan dan industri manufaktur yang tumbuh positif dibandingkan di triwulan 1 dan 2-2024.

PENERIMAAN PERPAJAKAN

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif PPn meningkat menjadi 12 persen pada 2025. Namun demikian, peningkatan tarif PPn ini dibatalkan oleh Presiden. Padahal peningkatan tarif PPn 12 persen ini berpotensi meningkatkan penerimaan perpajakan hingga 75,29 triliun rupiah.
- Pembatalan peningkatan tarif PPn menjadi 12 persen ini tidak berlaku pada barang mewah. PPn barang mewah tetap meningkat menjadi 12 persen dengan potensi penerimaan bagi negara sebesar **1,5 hingga 3,5 triliun rupiah**, namun demikian kebijakan insentif peningkatan PPn 12 persen tetap diberikan dengan total **265,5 triliun rupiah**.

Potensi penerimaan PPnBM 12% sebesar 1,5-3,5 triliun rupiah.

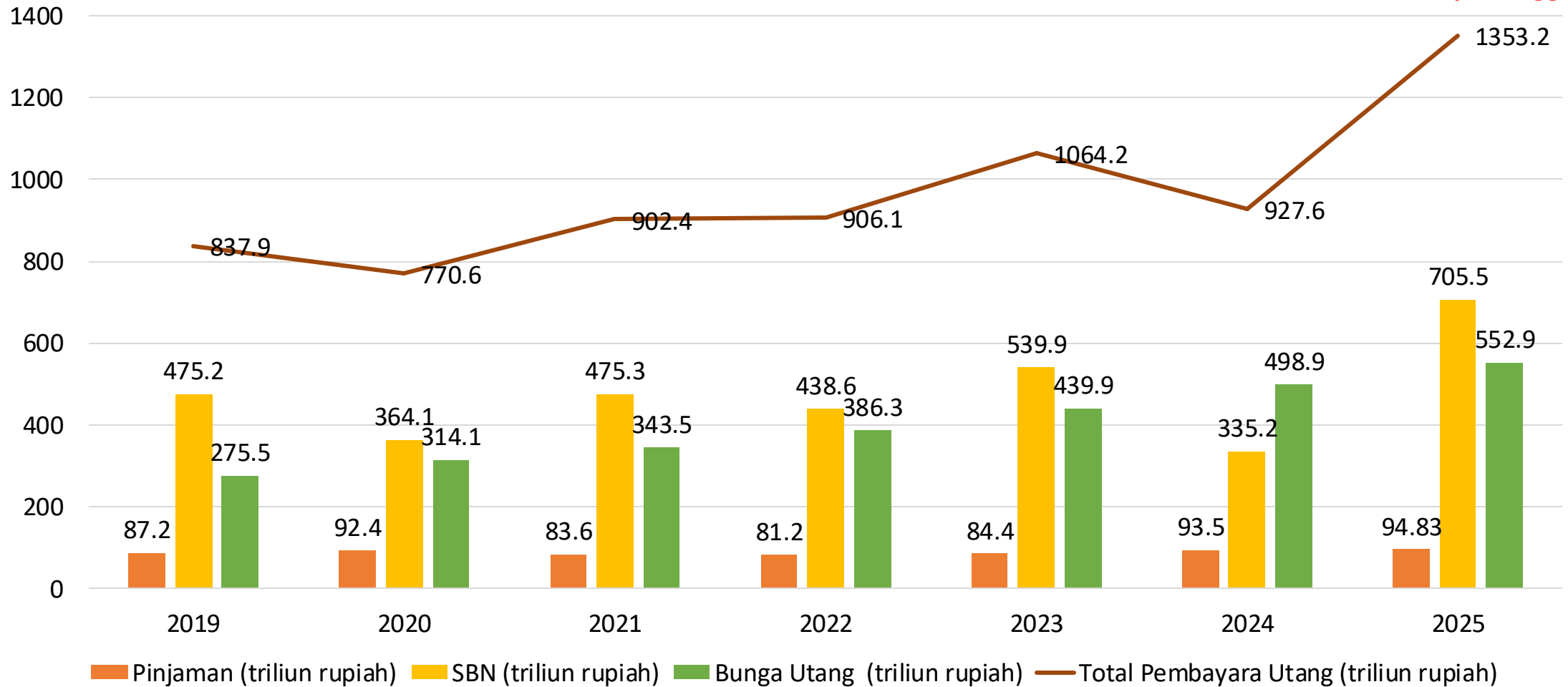
Biaya kebijakan insentif peningkatan PPn 12% sebesar 265,5 triliun rupiah

Peningkatan PPn 12 persen berpotensi menambah anggaran belanja lebih besar dibandingkan dengan potensi penerimaan perpajakan.

Sumber: Berbagai sumber, Kementerian Keuangan, 2025

PEMBAYARAN UTANG

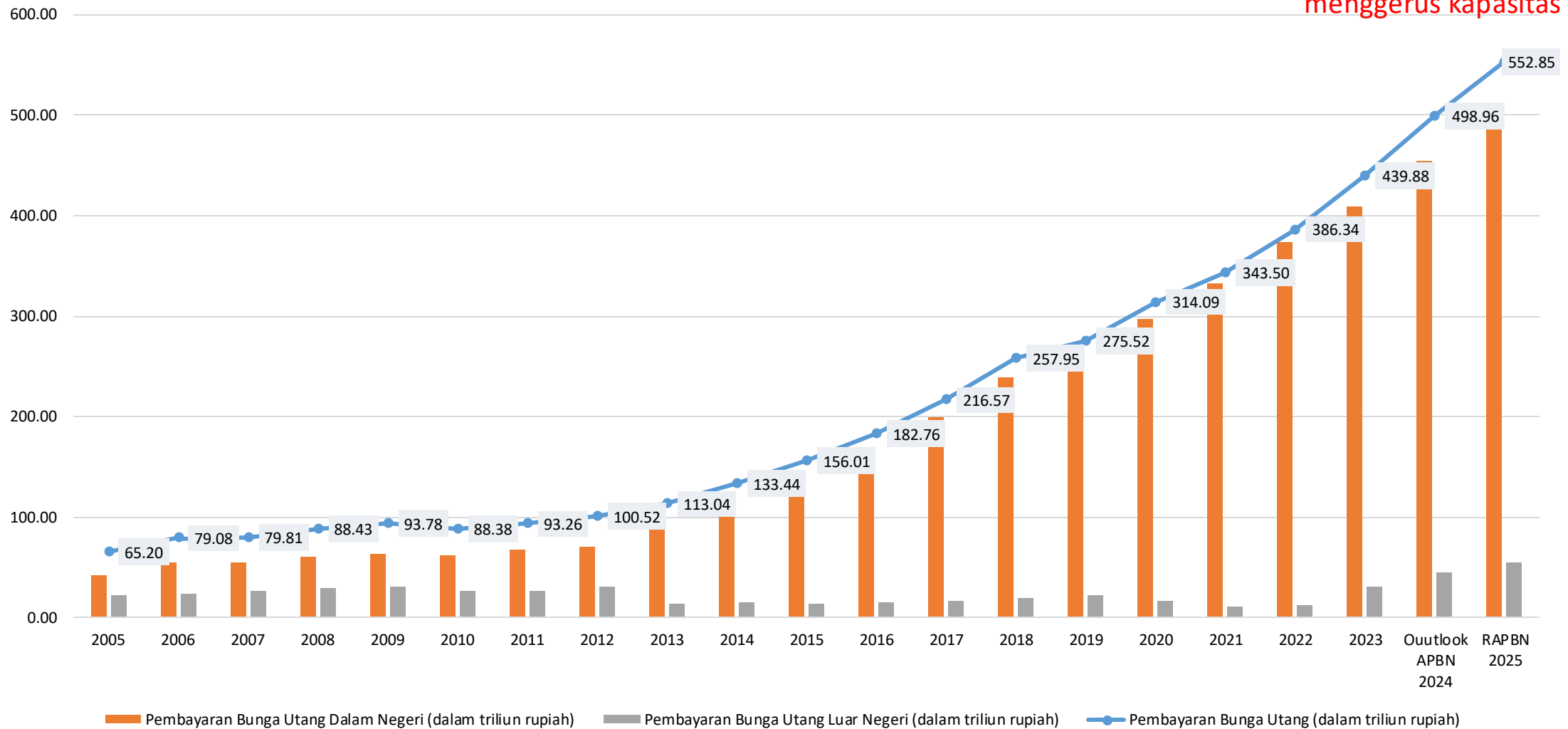
Kewajiban bayar utang di 2025 melonjak tinggi.



Sumber: Nota Keuangan RAPBN 2025, Kementerian Keuangan, 2024

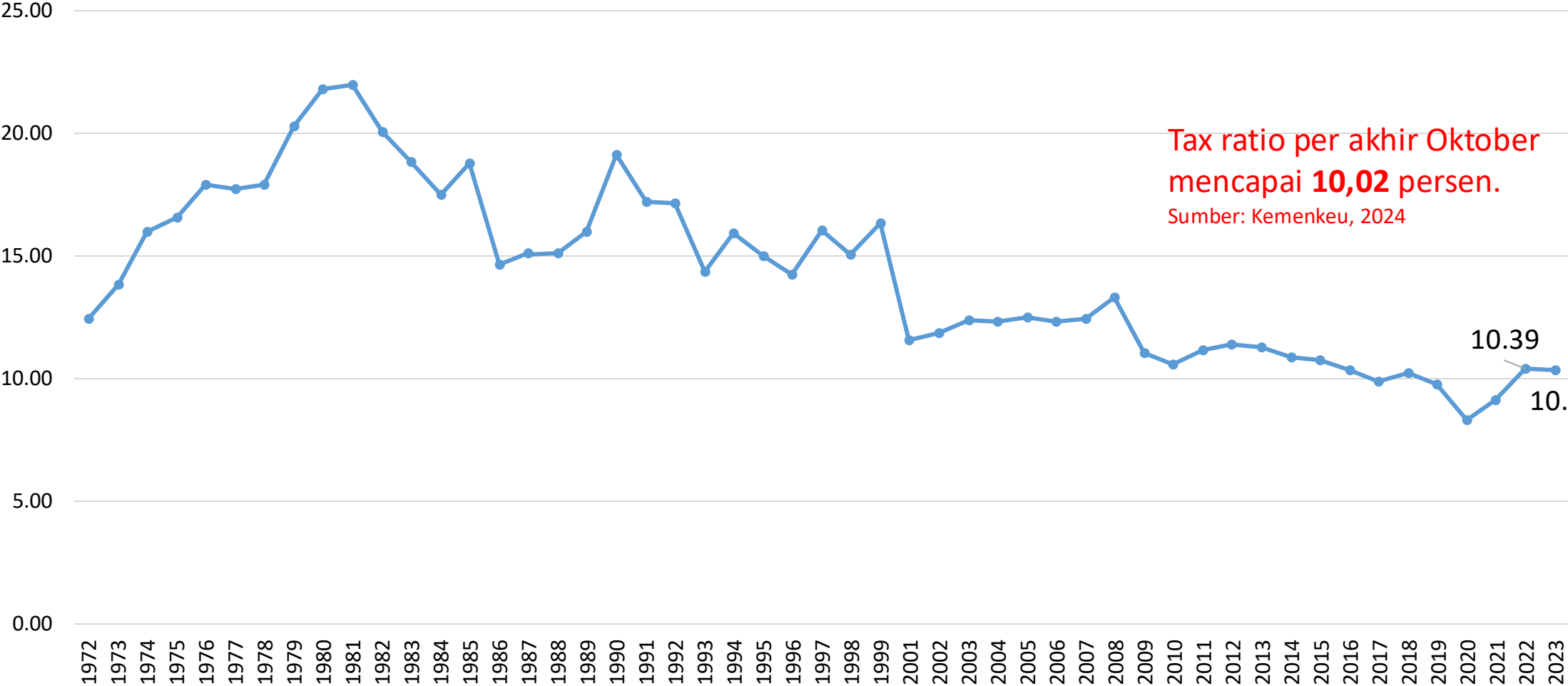
PERKEMBANGAN BUNGA UTANG

Beban bunga utang menggerus kapasitas fiskal.



Sumber: Kementerian Keuangan, 2024

PERKEMBANGAN TAX RATIO



Sumber: Kementerian Keuangan, 2024

1. ANGGARAN MAKAN BERGIZI GRATIS

Estimasi Anggaran Makan Bergizi Gratis

Paket makan per orang (dalam rupiah)	Jumlah penerima manfaat (juta jiwa)	Biaya sekali makan per paket nasi (triliun rupiah)	Jumlah hari (dalam setahun)	Kebutuhan Anggaran Makan Bergizi Gratis (triliun rupiah)
25.000	82,9	2,0725	260	538,85
18.000	82,9	1,4922	260	387,97
15.000	82,9	1,2435	260	323,31
10.000	82,9	0,829	260	215,54

Sumber: Berbagai sumber, kalkulasi INDEF, 2025

- Kebutuhan anggaran Makan Bergizi Gratis sangat cukup besar dengan kondisi APBN yang ketat. APBN di 2025 membutuhkan pembiayaan yang sangat besar karena utang jatuh tempo dan bunganya yang melonjak tinggi hingga mencapai 1.353,2 triliun rupiah. Hal ini menjadi tantangan yang sangat berat karena penerimaan perpajakan negara masih sangat terbatas, rasionya terhadap PDB terus mengalami perlambatan.
- Anggaran Makan Bergizi Gratis pada APBN 2025 masuk ke dalam anggaran Pendidikan yaitu sebesar 71 triliun. Angka ini jauh lebih kecil dari kebutuhan sekitar 215,54 triliun rupiah untuk target penerima manfaat 82,9 juta orang dengan biaya paket nasi per orang 10.000 rupiah.

1. ANGGARAN MAKAN BERGIZI GRATIS

Dengan paket nasi 10.000 rupiah per orang, kebutuhan anggaran MBG lebih besar dibandingkan dengan Belanja Modal maupun Belanja Bantuan Sosial.

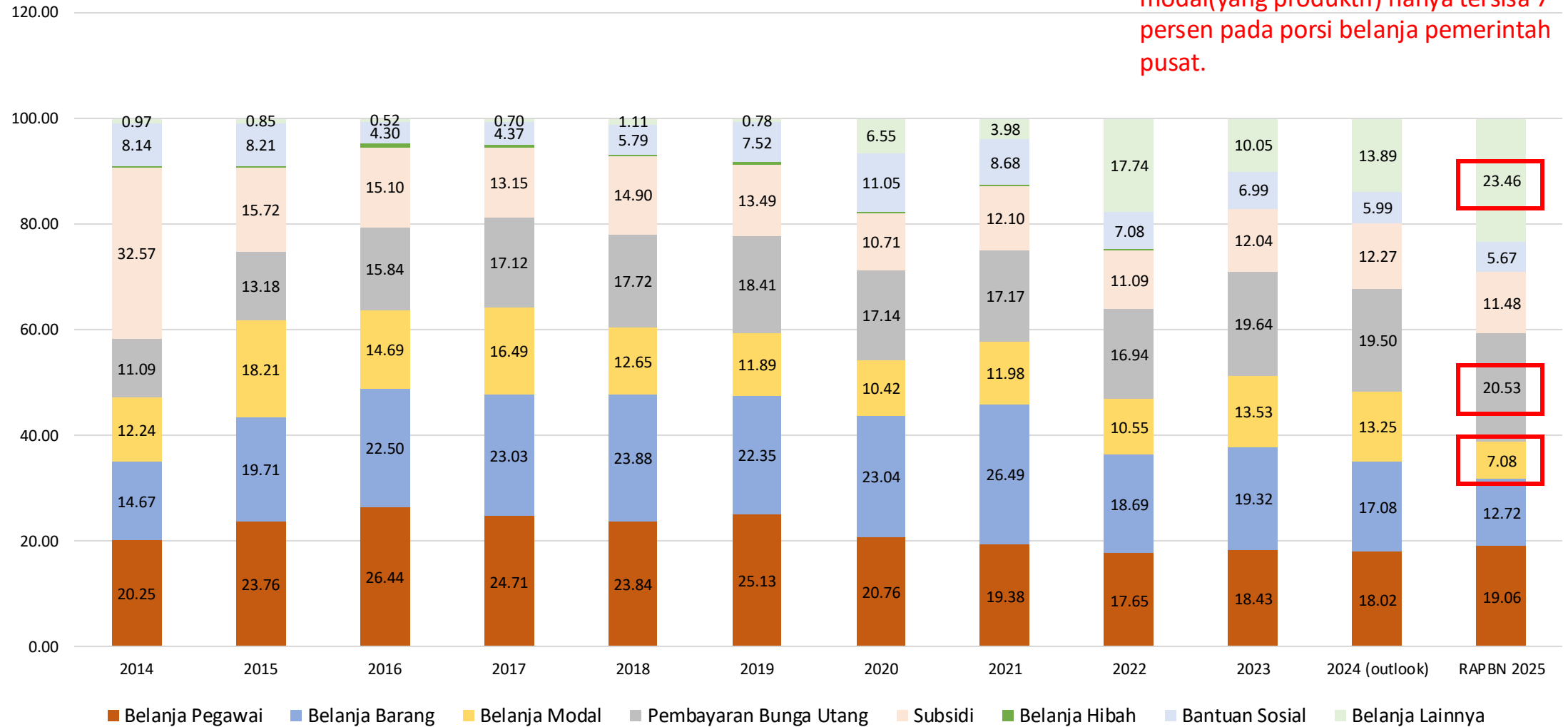
BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT JENIS, 2020-2025
(miliar rupiah)

URAIAN	LKPP 2020	LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	<i>Outlook</i> 2024	RAPBN 2025
1. Belanja Pegawai	380.532,2	387.752,5	402.441,7	412.711,3	460.863,6	513.229,5
2. Belanja Barang	422.338,2	530.059,3	426.149,1	432.715,0	436.877,6	342.610,4
3. Belanja Modal	190.919,8	239.632,3	240.570,3	303.041,3	338.945,3	190.637,5
4. Pembayaran Bunga Utang	314.088,1	343.495,4	386.341,8	439.882,6	498.955,8	552.854,3
a. Dalam Negeri	297.154,7	332.863,1	373.617,9	409.307,3	454.365,7	497.621,9
b. Luar Negeri	16.933,4	10.632,3	12.723,9	30.575,3	44.590,1	55.232,4
5. Subsidi	196.231,5	242.086,8	252.812,9	269.592,1	313.847,7	309.052,1
a. Subsidi Energi	108.840,5	140.395,2	171.858,8	164.292,3	192.751,4	204.532,4
b. Subsidi Non Energi	87.390,9	101.691,6	80.954,1	105.299,8	121.096,3	104.519,7
6. Belanja Hibah	6.275,9	4.319,0	5.803,3	219,1	6,6	202,7
7. Bantuan Sosial	202.530,0	173.654,1	161.523,1	156.601,6	153.313,0	152.697,9
8. Belanja Lain-Lain	120.035,2	79.704,4	404.385,8	225.023,7	355.409,2	631.899,8
Jumlah	1.832.950,9	2.000.703,8	2.280.027,9	2.239.786,7	2.558.218,8	2.693.184,2

Sumber: Kementerian Keuangan

PORSI BELANJA PEMERINTAH PUSAT

Kapasitas fiskal ketat, Belanja modal (yang produktif) hanya tersisa 7 persen pada porsi belanja pemerintah pusat.



Sumber: Kementerian Keuangan, 2024

BELANJA LAINNYA DIGUNAKAN UNTUK...

Arah kebijakan anggaran Program Pengelolaan Belanja Lainnya pada RAPBN tahun anggaran 2025, antara lain:

- a. antisipasi kegiatan tanggap darurat dan penanggulangan bencana;
- b. antisipasi risiko fiskal pada pelaksanaan APBN, baik akibat perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan/atau dinamika kebijakan;**
- c. antisipasi dukungan **ketahanan pangan dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan;**
- d. Antisipasi kebutuhan untuk kegiatan mendesak; dan
- e. dukungan **pembayaran kewajiban pemerintah, seperti kompensasi harga BBM dan listrik.**

Program Pengelolaan Belanja lainnya pada RAPBN tahun anggaran 2025 juga direncanakan untuk belanja lainnya yang terprogram, meliputi:

- (1) belanja bantuan masyarakatan Presiden dan Wakil Presiden**, yakni untuk mendukung kegiatan bantuan Presiden/Wakil Presiden dalam bidang organisasi masyarakatan, keagamaan, pendidikan, sosial, atau kegiatan lainnya;
- (2) belanja operasional lembaga yang belum mempunyai bagian anggaran sendiri**, yakni operasional SKK Migas dalam rangka mendukung pelayanan, pengawasan, hingga pengembangan industri hulu migas serta operasional Kawasan Bintan-Karimun dalam rangka pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas;
- (3) belanja ongkos angkut beras ASN distrik pedalaman provinsi- provinsi di wilayah Papua, yakni dalam rangka kegiatan penyaluran beras untuk pegawai ASN di wilayah tersebut; dan
- (4) belanja bantuan operasional layanan pos universal, yakni dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan umum untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pos kepada masyarakat

2. MAKAN BERGIZI GRATIS 2025 BUTUH TAMBAHAN ANGGARAN 100 TRILIUN RUPIAH dan PENGETATAN FISKAL PEMERINTAH

Tahapan Program Makan Bergizi Gratis 2025

Tahap	Periode	Penerima Manfaat	Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi
Tahap 1	Januari-April 2025	3 juta orang	937
Tahap 2	April-Agustus 2025	6 juta orang	2000
Tahap 3	Agustus-Desember 2025	15-17,5 juta orang	5000

Sumber: Berbagai sumber, diolah

- Kondisi fiskal pemerintah yang ketat, membuat Presiden akhirnya mengeluarkan Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Dalam Inpres tersebut efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar **306,69 triliun rupiah** terdiri atas: Anggaran belanja Kementerian/ Lembaga Tahun Anggaran 2025 sebesar 256,1 triliun rupiah dan Transfer ke Daerah sebesar 50,95 triliun rupiah.

2. MAKAN BERGIZI GRATIS 2025 BUTUH TAMBAHAN ANGGARAN 100 TRILIUN RUPIAH dan PENGETATAN FISKAL PEMERINTAH

INPRES NO 1 TAHUN 2025 TENTANG EFISIENSI BELANJA DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- KETIGA : Menteri/Pimpinan Lembaga untuk:
1. Melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja Kementerian/Lembaga sesuai besaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
 2. Identifikasi rencana efisiensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi belanja operasional dan non operasional, sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.
 3. Identifikasi rencana efisiensi sebagaimana dimaksud pada angka 1, tidak termasuk:
 - a. Belanja pegawai; dan
 - b. Belanja bantuan sosial.

Konsekuensi Pengetatan Anggaran dan Potensi Penganggaran MBG Ke Depan

Efisiensi anggaran akan mengurangi pada permintaan barang dan jasa yang berimplikasi pada penawaran dan produktivitas serta penyerapan tenaga kerja. Hal ini berpotensi mengurangi pertumbuhan PDB sektoral.

Efisiensi anggaran yang dilakukan perlu juga dialihkan pada sektor yang memiliki daya dorong besar terhadap peningkatan produktivitas dan perekonomian.

Pembiayaan MBG ke depan dapat dilakukan dengan menggandeng kolaborasi pihak swasta dan lembaga filantropi, sehingga beban APBN tidak begitu berat.

Pembiayaan MBG dapat dikolaborasikan dengan kegiatan eksisting yang mempunyai output yang searah untuk menurunkan stunting, meningkatkan kesehatan dan pendidikan.

Perlunya exit program dari berbagai program bantuan sosial agar bisa mandiri dan berdiri sendiri serta keluar dari kemiskinan, dengan begitu dananya bisa dialihkan ke program lain untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan.

Belanja APBN perlu diarahkan ke yang lebih produktif bukan bantuan sosial yang habis dikonsumsi.

TERIMA KASIH
